LAPORAN KEUANGAN

TAHUN 2019 (AUDITED)

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

RSJ. PROF. HB. SAANIN PADANG

Jl. Raya Ulu Gadut

Telp. (0751) 72001, Fax. (0751) 71379

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya Laporan Keuangan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Tahun 2019 telah dapat disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011, Direktur selaku Pengguna Anggaran Rumah Sakit berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Rumah Sakit yang dipimpinnya kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat melalui Kepala BAKEUDA Provinsi Sumatera Barat.

Penyusunan Laporan Keuangan terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Laporan Operasional, (c) Neraca, (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2019, telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai pihak yang berkepentingan.

Padang, Januari 2020

DIREKTUR

drg. ERNOVIANA, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19601118 198701 2 001

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Tahun 2019 yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Laporan Operasional, (c) Neraca, (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2019, sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Padang, Januari 2020

DIREKTUR

drg. ERNOVIANA, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19601118 198701 2 001

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Informasi umum

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Bagian Keuangan dibantu oleh dua Sub Bagian yakni Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan dan Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi. Sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pada bagian keuangan mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang yakni :

a. Visi

   " Pusat Unggulan Kesehatan Jiwa di Indonesia".

b. Misi

   - Memberikan Pelayanan Kesehatan Jiwa
   - Meningkatkan Kemandirian Rumah Sakit.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Reformasi manajemen keuangan negara, ditandai dengan diluncurkannya satu paket perundang-undangan bidang keuangan negara yakni UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara) membawa implikasi diperlukannya sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif.

Upaya konkrit mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan negara menyampaikan laporan pertanggung - jawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Laporan harus disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Seiring hal tersebut, Laporan Keuangan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Provinsi Sumatera Barat disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan APBD TA 2019. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Laporan Keuangan yang disusun meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca,
3. Laporan Operasional (LO)
4. Catatan atas Laporan Keuangan.
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Keuangan disusun bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- ✓ Menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pembiayaan dalam periode berjalan.
- ✓ Menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.
- ✓ Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- ✓ Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- ✓ Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber penerimaannya.
- ✓ Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang dilakukan dalam satu periode pelaporan.

Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan untuk penerapannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Selanjutnya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 238/PMK-05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah maka disusunlah Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu :

- Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.
- Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82

Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

Dalam penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan penjabaran realisasi APBD TA 2019, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Guna mengurangi perbedaan struktur akun pendapatan dan belanja pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka dalam proses penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dilakukan langkah pemetaan atau konversi. Konversi dilakukan dengan cara menelusuri kembali *(trace back)* pos-pos Laporan Keuangan menurut Permendagri Nomor : 13/2006 dengan pos-pos Laporan Keuangan menurut SAP.

1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan tahun 2019 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- Undang-Undang Dasar Republik Indonsia 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 61 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979.
- Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Hibah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.
- Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan SAL dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta informasi lainnya yang diperlukan. Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 meliputi hal-hal berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Informasi Umum
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro
2.2 Kebijakan Keuangan

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.2 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

4.3 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

4.4 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.5 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah Daerah

BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

5.1.1. Pendapatan LRA

5.1.2. Belanja

5.2. Penjelasan Neraca

5.2.1. Aset

5.2.2. Kewajiban

5.2.3. Ekuitas Dana

5.3. Penjelasan Laporan Operasional (LO)

5.3.1. Pendapatan LO

5.3.2. Beban

5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

5.5. Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII. PENUTUP

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Tujuan Pembangunan saat ini adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat baik fisik, mental maupun spiritual. Tujuan ini dapat dicapai dengan adanya kelanjutan dan pemerataan pendidikan, peningkatan derajat kesehatan serta peningkatan pendapatan masyarakat.

Tercapainya peningkatan derajat kesehatan masyarakat tidak terlepas dari peran serta Rumah Sakit sebagai tempat pelayanan kesehatan. Agar Rumah Sakit berfungsi secara maksimal, maka sangat dibutuhkan sarana dan prasarana yang mampu mendorong terciptanya pelayanan kesehatan yang berkualitas.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang dalam mengelola anggaran tahun 2019 meliputi hal berikut :

2.2.1 Kebijakan Peningkatan Pendapatan

- Peningkatan kualitas Pelayanan Kesehatan.
- Pelayanan Apotik.
- Kerjasama dengan pihak ketiga.

2.2.2 Kebijakan Belanja

- Meningkatkan Efisiensi Penggunaan Anggaran dalam upaya optimalisasi sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu.
- Pengalokasian belanja untuk Prioritas Program dan kegiatan yang memberikan dampak kepada masyarakat.
- Meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Pelaksanaan kegiatan operasional RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang tertampung dalam Anggaran APBD yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung.

1) Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai dan tambahan penghasilan pegawai.

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
1.	Belanja Tidak Langsung + Tambahan Penghasilan Pegawai	20.258.770.622,00	19.758.576.802,00

2) Belanja langsung terdiri dari 2 (dua) program

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi
1.	Belanja Langsung	39.109.086.597,00	36.042.069.484,00

Adapun program dan kegiatan APBD dari Belanja Langsung adalah sebagai berikut :

Program : Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa/RS. Paru/RS. Mata

Kegiatan : Pembangunan Pagar RS Lanjutan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan	70%
Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	1.669.564.429,00
Keluaran	Terlaksananya Pembangunan Pagar RS Lanjutan	1400 m’
Hasil	Meningkatkan Layanan Kesehatan Rumah Sakit	100%

Program : Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa/RS. Paru/RS. Mata

Kegiatan : Pengadaan Sarana Perawatan Bagi Penderita Akibat Asap Rokok

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan	70%
Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	575.000.000
Keluaran	Terpenuhinya Peralatan Kesehatan RS	67 unit
Hasil	Meningkatnya prasaran pelayanan Rumah Sakit	100%

Program : Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa/RS. Paru/RS. Mata

Kegiatan : Pengembangan Jalan Lingkung Rumah Sakit

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan	70%
Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	567.083.714
Keluaran	Terlaksananya Pengembangan Jalan Lingkung	239 m
Hasil	Meningkatnya Layanan Rumah Sakit	100%

Program : Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa/RS. Paru/RS. Mata

Kegiatan : Pembangunan Bangsal Rawat Inap Kelas II (DAK)

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan	70%
Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	5.238.601.117
Keluaran	Terlaksananya Pembangunan Bangsal Rawat Inap	1 Unit
Hasil	Meningkatnya Layanan Rumah Sakit	100%

Program : Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa/RS. Paru/RS. Mata

Kegiatan : Pengadaan Alat Kesehatan Instalasi Gawat Darurat (DAK)

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Kenaikan Rehabilitasi Rawat Inap dan Rawat Jalan	70%
Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	393.943.011
Keluaran	Tersedianya Peralatan Kesehatan Rumah Sakit	15 Unit
Hasil	Meningkatnya Prasarana Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	100%

Program : Program Peningkatan Pelayanan BLUD

Kegiatan : Pelayanan BLUD RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	1. Avlos (Average Lenght Of Stay) Standar RSJ <42 Hari. 2. Respons Time IGD (<5 menit), 3. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat), 4. Tingkat Kemandirian Keuangan (TKK)	1. 43 Hari 2. 100% 3. 85% 4. 44%
Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	30.664.894.326
Keluaran	Terlaksananya pelayanan BLUD RS	12 Bulan
Hasil	Meningkatnya mutu pelayanan RS	100%

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Dalam Tahun Anggaran 2019, OPD RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Provinsi Sumatera Barat merencanakan penerimaan Pendapatan Daerah melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD Perubahan) sebesar Rp. 28.918.000.000,- yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Sedangkan Belanja daerah untuk OPD RS. Jiwa Prof HB. Saanin Padang sejumlah Rp 59.367.857.219,- direncanakan untuk membiayai :

- Belanja Pegawai Rp. 20.258.770.622,-
- Belanja Barang dan Jasa Rp. 29.280.094.326,-
- Belanja Modal Rp. 9.644.192.271,-

Capaian kinerja keuangan dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pendapatan

Dari hasil pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2019 diperoleh realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp. 28.627.487.930,00. Secara rinci capaian perolehan Pendapatan BLUD 2019 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	PENDAPATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/KURANG
A.	**Pendapatan BLUD RSJ. HB. Saanin**	**28.918.000.000,00**	**28.684.187.930,00**	**99,19**	**233.812.070,00**
1.	**Pelayanan**	**27.822.000.000,00**	**27.396.857.781,00**	**98,47**	**425.142.219,00**
a.	Instalasi Gawat Darurat/Picu	35.000.000,00	42.451.735,00	121,29	(7.451.735,00)
b.	Instalasi R. Jalan	14.545.000.000,00	12.519.270.586,00	86,07	2.025.729.414,00
c.	Instalasi R. Inap A	882.000.000,00	442.834.260,00	50,21	439.165.740,00
d.	Instalasi R. Inap B	11.060.000.000,00	12.171.262.307,00	110,05	(1.111.262.307,00)
e.	Instalasi Napza	300.000.000,00	577.369.800,00	192,46	(277.369.800,00)
f.	Instalasi Farmasi	1.000.000.000,00	1.643.669.093,00	164,37	(643.669.093,00)
2.	**Pendapatan Usaha**	**1.096.000.000,00**	**1.287.330.149,00**	**117,46**	**(191.330.149,00)**
a.	Diklat	850.000.000,00	889.455.000,00	104,64	(39.455.000,00)
b.	Kerjasama Operasional (KSO)	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
c.	Keuangan	60.000.000,00	48.222.580,00	80,37	11.777.420,00
d.	Tata Usaha	25.000.000,00	23.778.184,00	95,11	1.221.816,00
e.	Penerimaan Lain-lain	160.000.000,00	325.874.385,00	203,67	(165.874.385,00)

Pada tabel di atas terlihat Anggaran Pendapatan dan Realisasi Pendapatan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang pada Tahun Anggaran 2019.

2. Belanja Daerah

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian belanja dan pengeluaran dalam Laporan Keuangan dikelompokan menjadi belanja operasi dan belanja modal yang dapat diuraikan sebagai berikut :

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/KURANG
I.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**20.258.770.622,00**	**19.758.576.802,00**	**97,53**	**500.193.820,00**
1.	Gaji dan Tunjangan	14.777.664.010,00	14.483.077.827,00	98,01	294.586.183,00
2.	Tambahan Penghasilan PNS	5.481.106.612,00	5.275.498.975,00	96,25	205.607.637,00
II.	**BELANJA LANGSUNG**	**39.109.086.597,00**	**36.042.069.484,00**	**92,16**	**3.067.017.113,00**
1.	Belanja Pegawai	184.800.000,00	135.285.673,00	73,21	49,514,327,00
2.	Belanja Barang	29.280.094.326,00	28.100.258.001,00	95,97	1.179.836.325,00
3.	**BELANJA MODAL**	**9.644.192.271,00**	**7.806.525.810,00**	**80,95**	**1.837.666.461,00**
a.	Belanja Tanah	-	-	-	-
b.	Belanja Peralatan dan Mesin	1.758.943.011,00	1.057.791.770,00	60,14	701.151.241,00
c.	Belanja Gedung	7.308.165.546,00	6.213.505.250,00	85,02	1.094.660.296,00
d.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	567.083.714,00	535.228.790,00	94,38	31.854.924,00
e.	Belanja Aset Tetap Lainnya	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00

Pencapaian realisasi keuangan atas program dan kegiatan yang telah dialokasikan dalam DPA OPD RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Program **:** Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/RS. Paru/RS. Mata

N0	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Pembangunan Pagar Rumah Sakit	1.669.564.429,00	1.622.246.500,00	97,17
2.	Pengadaan Sarana Perawatan Bagi Penderita Akibat Asap Rokok (DBHCHT)	575.000.000,00	561.964.530,00	97,73
3.	Pengembangan Jalan Lingkung Rumah Sakit	567.083.714,00	535.228.790,00	94,38
4.	Pembangunan Bangsal Rawat Inap Kelas II (DAK)	5.238.601.117,00	4.429.198.500,00	84,55
5.	Pengadaan Alat Kesehatan Instalasi Gawat Darurat (DAK)	393.943.011,00	318.394.120,00	80,82

Program : Program Peningkatan Pelayanan BLUD

N0	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Pelayanan BLUD	30.664.894.326,00	28.575.037.044,00	93,18

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

a. Program kegiatan : Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

Program dan kegiatan Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS pada RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang dapat terlaksana dengan realisasi Fisik 100%, namun untuk Realisasi Keuangan ada beberapa kegiatan yang dibawah 90%, diantaranya :

PPTK Bangunan Fisik APBD

- Pembangunan Bangsal Rawat Inap Kelas II (DAK)

  Dari Anggaran yang tersedia Rp. 5.238.601.117,00 terealisasi fisik 100%. Realisasi Keuangan Rp. 4.429.198.500,00,- sebesar 84,55%.

  Hambatan dan Kendala :

  - Hal ini merupakan efisiensi pada pengelolaan kegiatan dan perjalanan dinas yang tidak direalisasikan.

PPTK Alat Kesehatan APBD

- Pengadaan Peralatan Kesehatan Instalasi Gawat Darurat (DAK)

  Dari Anggaran yang tersedia Rp. 393.943.011,00 terealisasi fisik 100%. Realisasi Keuangan Rp. 318.394.120,00,- sebesar 80,82%.

  Hambatan dan Kendala :

  - Hal ini merupakan efisiensi dan negosiasi harga ongkos kirim dan adanya peralatan asesoris yang tidak tayang lagi di e-catalog.

BAB IV
KEBIJAKAN UMUM AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran, dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2019 RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 36 Tahun 2009 tanggal 7 September 2009 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor : 110 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 110 tahun 2008 tentang Kebijaksanaan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 63 Tahun 2011 tanggal Desember 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijaksanaan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Peraturan Gubernur Sumatera Barat No 05 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap.

4.1 Entitas Akuntansi

RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang adalah sebagai entitas akuntansi Penggunaan Anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan yang harus disampaikan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat melalui Kepala BAKEUDA untuk dikompilasi dan menjadi bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Barat.

Sesuai dengan Pergub No. 93 Tahun 2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Perubahan keempat atas Pergub No. 110 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Pelaporan Keuangan

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas.

a. **Pendapatan-LO** adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
b. **Pendapatan-LRA** adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

c. **Belanja** adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah

d. **Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintahan daerah sebagai akibat peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

e. **Aset tak berwujud** adalah aset non keuangan yang diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

f. **Aset tetap** adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

g. **Aset lainnya** merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

h. **Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

i. **Ekuitas Dana** adalah kekayaan bersih Rumah Sakit yang merupakan selisih antara aktiva dan hutang yang terklarifikasi atas ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan. Mutasi pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas dana di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan Neraca adalah sebagai berikut :

Pengukuran / Penilaian Aset :

a. **Kas**

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepihak ketiga berupa utang PFK.

b. **Piutang**

Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan.

c. **Persediaan**

Persediaan disajikan sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

d. **Tanah**

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, dan lain-lain. Apabila perolehan tanah pemerintah daerah dilakukan oleh panitia pengadaan, maka termasuk dalam harga perolehan tanah adalah honor panitia pengadaan tanah. Tanah disajikan dalam neraca sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat tanah tersebut diperoleh.

e. **Gedung dan bangunan**

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehannya. Dan disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Jika gedung dan bangunan dibangun secara swakelola maka nilainya meliputi biaya langsung tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

f. **Peralatan dan Mesin**

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas peralatan dan mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan peraltan dan mesin yang diperoleh melalui kontrak, meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

g. **Jalan Irigasi dan Jaringan**

Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh, Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya pengosongan dan pebongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

h. **Aset Tetap Lainnya**

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari

biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

i. **Kontruksi Dalam Pengerjaan**

KDP dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses kontruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak kontruksi.

h. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap berupa:

1. Gedung dan bangunan
2. Peralatan dan mesin
3. Jalan, irigasi, dan jaringan, dan
4. Aset tetap lainnya berupa aset tetap renovasi, alat musik modern dan alat olahraga.

Aset tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan dengan pihak ketiga dan Aset yang dimanfaatkan pihak lain disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya. Dan aset tetap dalam kondisi rusak berat atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah Daerah

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan pada pos-pos laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintah. Pada tahun anggaran 2005 dilaksanakan penyusunan neraca awal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Seiring hal tersebut dilaksanakan penilaian kembali atas seluruh aset-aset tetap daerah.

Untuk pengadaan jenis aset yang masa perolehan/pengadaan setelah tahun anggaran 2005 penyajiannya telah berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran (*at cost*). Sesuai pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 tentang Aktiva Tetap bahwa Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Tahun 2014 telah dilakukan penyusutan untuk Aset Tetap pertama kali Tahun 2013 dan penyusutan per 31 Desember 2014. Berdasarkan Peraturan Gubernur No 05 Tahun 2014 tanggal 24 Januari 2014. Sedangkan amortisasi dilakukan berdasarkan Peraturan Gubernur No 43 Tahun 2014 Tanggal 28 Mei 2014.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

5.1.1 Pendapatan LRA

- Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi pendapatan lain-lain PAD yang sah dalam tahun anggaran 2019 dan 2018. Untuk realisasi Tahun 2019 mencapai 99,00% dari anggarannya. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018, maka terdapat kenaikan sebesar Rp. 177.717.502,00.

No	Perkiraaan	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Tahun 2018
I	**Pendapatan Lain-lain PAD yang sah**	**28.918.000.000,00**	**28.684.187.930,00**	**99,19**	**28.449.770.428,00**
1.	**Pendapatan Operasional**	**27.822.000.000,00**	**27.396.857.781,00**	**98,47**	**27.327.542.362,00**
a.	Instl. Gawat Darurat/ PICU	35.000.000,00	42.451.735,00	121,29	34.632.356,00
b.	Instl R. Jalan	14.545.000.000,00	12.519.270.586,00	86,07	14.428.570.781,00
c.	Instl R. Inap A	882.000.000,00	442.834.260,00	50,21	546.107.996,00
d.	Instl R. Inap B	11.060.000.000,00	12.171.262.307,00	110,05	9.982.209.915,00
e.	Instl Napza	300.000.000,00	577.369.800,00	192,46	942.249.388,00
f.	Instl Farmasi	1.000.000.000,00	1.643.669.093,00	164,37	1.393.771.926,00
2.	**Pendapatan Usaha**	**1.096.000.000,00**	**1.287.330.149,00**	**117,46**	**1.122.228.066,00**
a.	Diklat	850.000.000,00	889.455.000,00	104,64	948.555.000,00
b.	KSO	1.000.000,00	-	-	-
c.	Keuangan	60.000.000,00	48.222.580,00	80,37	98.433.579,00
d.	Tata Usaha	25.000.000,00	23.778.184,00	95,11	2.415.000,00
e.	Penerimaan Lain-lain	160.000.000,00	325.874.385,00	203,67	72.824.487,00

Penerimaan pendapatan RS. Jiwa. Prof. HB. Saanin Padang dilaksanakan berdasarkan peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum dan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

5.1.2. Belanja

1. **Belanja Operasi**

   a. **Belanja Pegawai**

No	Perkiraaan	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Tahun 2018
1.	**Belanja Pegawai**				
a.	APBD	20.258.770.622,00	19.758.576.802,00	97,53	18.865.804.253,00
b.	BLUD	184.800.000,00	135.285.673,00	73,21	4.174.885.062,00
	Jumlah	**20.443.570.622,00**	**19.893.862.475,00**	**97,31**	**23.040.689.315,00**

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2019 dan 2018. Untuk realisasi tahun 2019 mencapai 97.31% dari anggarannya. Dibandingkan dengan tahun anggaran 2018 terdapat penurunan yang cukup besar yakni sebesar Rp. 3.146.826.840,00. Hal ini disebabkan karena pos belanja pegawai Non PNS untuk tahun 2019 ini masuk ke rekening Belanja Barang dan Jasa BLUD, tidak lagi di rekening Belanja Pegawai BLUD seperti di tahun 2018.

Berikut rincian objek belanja pegawai :

No	Perkiraaan	Anggaran 2020	Realisasi 2019	%	Tahun 2018
1.	**APBD**	**20.258.770.622,00**	**19.758.576.802,00**	**97,53**	**18.865.804.253,00**
a.	Gaji dan Tunjangan	**14.777.664.010,00**	**14.483.077.827,00**	**98,01**	**13.604.727.835,00**
-	Gaji Pokok PNS	11.398.057.435,00	11.316.555.810,00	99,28	10.587.093.500,00
-	Tunjangan Keluarga	1.104.835.309,00	1.077.909.511,00	97,56	1.007.683.458,00
-	Tunjangan Jabatan	236.670.000,00	195.600.000,00	82,65	227.720.000,00
-	Tunjangan Fungsional	957.920.000,00	953.365.000,00	99,52	927.255.000,00
-	Tunjangan Fungsional Umum	229.240.000,00	222.885.000,00	97,23	170.775.000,00
-	Tunjangan Beras	636.674.560,00	602.824.080,00	94,68	582.763.740,00
-	Tunjangan PPh	110.310.700,00	21.080.190,00	19,11	14.333.769,00
-	Pembulatan Gaji	259.218,00	180.605,00	69,67	149.896,00
-	Iuran Jaminan Kematian/Uang Muka	76.452.756,00	69.508.434,00	90,92	65.216.899,00
-	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	27.244.032,00	23.169.197,00	85,04	21.736.573,00
b.	Tambahan Penghasilan PNS	5.481.106.612,00	5.275.498.975,00	96,25	5.261.076.418,00
2.	**BLUD**	**184.800.000,00**	**135.285.673,00**	**73,21**	**4.174.885.062,00**
a.	Belanja Pegawai BLUD	184.800.000,00	135.285.673,00	73,21	4.174.885.062,00

Saldo/jumlah belanja pegawai tersebut diatas adalah jumlah netto setelah dikuranginya pengembalian belanja pegawai selama tahun 2019 sejumlah Rp 14.660.971,00 yang terdiri dari :

No	Uraian / Objek Belanja	LS
1.	Pengembalian Gaji Bulan Mei Tahun 2019 a.n Rismaini, S.Sos	5.282.000,00
2.	Pengembalian Tunda Ke 13 Tahun 2019 a.n Jamuar	43.500,00
3.	Pengembalian Tunda Ke 13 Tahun 2019 a.n Jairin Herianto	1.105.363,00
4.	Pengembalian Tunda Ke 13 Tahun 2019 a.n Junimar	2.452.908,00
5.	Pengembalian Gaji Agustus Tahun 2019 a.n Drs. Erizal, MM	2.150.300,00
6.	Pengembalian Gaji Agustus Tahun 2019 a.n Bentoniwarman, SKM	2.616.900,00
7.	Pengembalian Tunjangan Fungsional a.n Zulfia Efita	1.010.000,00
Jumlah		**14.660.971,00**

b. Belanja Barang dan Jasa

No	Perkiraaan	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Tahun 2018
1.	**Belanja Barang dan Jasa**				
a.	APBD	-	-	-	-
b.	BLUD	29.280.094.326,00	28.100.258.001,00	95,97	26.379.841.988,00
	Jumlah	**29.280.094.326,00**	**28.100.258.001,00**	**95,97**	**26.379.841.988,00**

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019 dan 2018. Untuk realisasi Tahun 2019 mencapai 95,97% dari anggarannya. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2018 terdapat kenaikan sebesar Rp. 1.720.416.013,00.

Belanja Barang dan Jasa merupakan belanja barang dan jasa BLUD. Sisa anggaran belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 1.179.836.325,00 adalah sisa dari anggaran BLUD tersebut.

2. Belanja Modal

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No	Perkiraaan	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Tahun 2018
1.	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**				
a.	APBD	968.943.011,00	880.358.650,00	90,86	3.022.231.946,00
b.	BLUD	790.000.000,00	177.433.120,00	22,46	1.180.069.000,00
	Jumlah	**1.758.943.011,00**	**1.057.791.770,00**	**60,14**	**4.202.300.946,00**

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin tahun 2019 dan 2018. Realisasi tahun 2019 mencapai 60,14% dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 terdapat penurunan sebesar Rp. 3.144.509.176,00.

Adapun rincian objek belanja modal peralatan dan mesin terdiri dari :

No	Perkiraaan	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Tahun 2018
1.	**APBD**	**968.943.011,00**	**880.358.650,00**	**90,86**	**3.022.231.946,00**
a.	BM. Alat Kedokteran	393.943.011,00	318.394.120,00	80,82	847.416.099,00
b.	BM.Alat Kesehatan Perawatan	575.000.000,00	561.964.530,00	97,73	1.509.330.561,00
2.	**BLUD**	**790.000.000,00**	**177.433.120,00**	**22,46**	**1.180.069.000,00**
a.	B. Peralatan dan Mesin BLUD	790.000.000,00	177.433.120,00	22,46	1.180.069.000,00

Sisa anggaran belanja modal peralatan dan mesin adalah Rp. 701.151.651,00. Dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin ini, sejumlah Rp. 965.000,00 merupakan belanja yang tidak dikapitalisir/dikoreksi dari aset tetap karena harga satuannya dibawah Rp. 1.000.000,00, dibawah nilai yang dikapitalisir menjadi aset tetap. Berikut adalah rincian belanja modal yang tidak dikapitalisir :

No	Nama Barang	Jml. Barang	Harga Barang	Jumlah
1	Trolli Barang	1 Unit	965.000,00	965.000,00
	Jumlah			**965.000,00**

b. Belanja Modal Gedung & Bangunan

No	Perkiraaan	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Tahun 2018
1.	**Belanja Modal Gedung & Bangunan**				
a.	APBD	6.908.165.546,00	6.051.445.000,00	87,60	2.167.914.396,00
b.	BLUD	400.000.000,00	162.060.250,00	40,52	81.588.000,00
	Jumlah	**7.308.165.546,00**	**6.213.505.250,00**	**85,02**	**2.249.502.396,00**

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan tahun 2019 dan 2018. Realisasi tahun 2019 mencapai 85,02% dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 terdapat kenaikan sebesar Rp. 3.964.002.854,00. Adapun rincian objek belanja modal Gedung dan Bangunan terdiri dari:

No	Perkiraaan	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Tahun 2018
1.	**APBD**	**6.908.165.546,00**	**6.051.445.000,00**	**87,60**	**2.167.914.396,00**
a.	BM. Pengadaan Bangunan Kesehatan	6.908.165.546,00	6.051.445.000,00	87,60	2.167.914.396,00
2.	**BLUD**	**400.000.000,00**	**162.060.250,00**	**40,52**	**81.588.000,00**
a.	B. Pengadaan gedung dan bangunan	400.000.000,00	162.060.250,00	40,52	81.588.000,00

Sisa belanja modal gedung dan bangunan sejumlah Rp. 1.094.660.296,00 adalah sisa dari plafon anggaran.

c. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Perkiraaan	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Tahun 2018
1.	**Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**				
a.	APBD	567.083.714,00	535.228.790,00	94,38	925.702.023,00
	Jumlah	**567.083.714,00**	**535.228.790,00**	**94,38**	**925.702.023,00**

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2019 dan 2018. Realisasi tahun 2019 mencapai 94,38% dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 terdapat penurunan sebesar Rp. 390.473.233,00.

d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No	Perkiraaan	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Tahun 2018
1.	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**				
a.	BLUD	10.000.000,00	0,00	0	9.676.000,00
	Jumlah	**10.000.000,00**	**0,00**	**0**	**9.676.000,00**

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal aset tetap lainnya tahun 2019 dan 2018. Realisasi tahun 2019 adalah 0% dari anggarannya atau tidak terlaksana. Hal ini disebabkan karena kebijakan dari pimpinan untuk efisiensi anggaran dan memprioritaskan kegiatan yang menunjang pelayanan langsung, mengingat pendapatan yang tidak lancar dari klaim tagihan BPJS yang menunggak.

Daftar belanja modal tahun 2019 dapat dilihat pada lampiran 21 dan daftar belanja modal yang tidak dikapitalisir dapat dilihat pada lampiran 22.

Tidak dikapitalisirnya belanja modal tersebut sesuai dengan kebijakan akuntansi pemerintah provinsi sumatera barat yang ditetapkan dengan peraturan gubernur Nomor 43 tahun 2015 tentang kebijakan akuntansi, sistem akuntansi dan bagan akun standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015.

5.2. Penjelasan Pos-Pos Neraca

5.2.1. ASET

Aset Lancar

Perkiraan	2019	2018
1. Kas di Bendahara Pengeluaran	**0,00**	**0,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo kas di Bendahara Pengeluaran RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang per 31 Desember 2019 dan 2018. Sampai dengan 31 Desember 2019, sisa UYHD sebesar Rp. 14.660.971,00 telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2019. Semua pengembalian belanja dan pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran telah disetorkan ke Kas daerah pada akhir tahun 2019. Berikut adalah Rincian sisa UYHD dan penyetorannya dapat dilihat pada lampiran 1.

Uraian	Jumlah
Jumlah Penerimaan Januari-Desember 2019	19.758.576.802,00
Jumlah Pengeluaran Januari-Desember 2018	19.773.237.773,00
Saldo	**14.660.971,00**

Perkiraan	2019	2018
2. Kas di Bendahara BLUD	**2.583.157.514,66**	**2.316.816.750,66**

Jumlah tersebut merupakan saldo kas di Bendahara Pengeluaran BLUD RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang per 31 Desember 2019 dan 2018 merupakan bagian dari SILPA yang akan digunakan untuk operasional Rumah Sakit dan tidak disetorkan ke rekening kas umum daerah. Berikut adalah rincian kas di bendahara BLUD :

Saldo Audited 2018		**2.316.816.750,66**
Mutasi Tambah		
- Pendapatan 2019	28.684.187.930,00	
- Koreksi Tambah Kas (audit BPK)	157.189.878,00	
Total Mutasi Tambah	**28.841.377.808,00**	
Mutasi Kurang		
-Belanja Operasional BLUD	28.575.037.044,00	
Total Mutasi Kurang	**28.575.037.044,00**	
Total Mutasi		**266.340.764,00**
Saldo Kas Per 31 Des 2019		**2.583.157.514,66**

Penambahan merupakan pendapatan BLUD dari layanan selama tahun 2019 sebesar Rp. 28.684.187.930,00, dan koreksi tambah Kas di Bendahara BLUD (berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK-RI) dari saldo Rekening Deposit Pasien dengan nilai fisik sebesar Rp.

213.889.878,00, telah terindentifikasi dan diakui sebagai pendapatan 2019 sebesar Rp. 56.700.000,00 sehingga sisa saldo pada Rekening Deposit tersebut senilai Rp. 157.189.878,00.

Pengurangan adalah pengeluaran BLUD untuk membiayai operasional rumah sakit selama tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 28.575.037.044,00.

Perkiraan	2019	2018
3. Kas Lainnya	**0,00**	**0,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo kas lainnya pada Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2019 dan 2018.

Perkiraan	2019	2018
4. Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	**2.983.404.795,00**	**4.581.529.698,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2019 dan 2018 yang terdiri dari:

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Pasien Umum	445.114.198,00	61.020.885,00	19.420.291,00	486.714.792,00
Pasien Dinsos	210.967.395,00	106.977.280,00	31.396.777,00	286.547.898,00
Klaim BPJS Ketenagakerjaan	1.956.205,00	-	1.956.205,00	-
Klaim BPJS Kesehatan	3.896.491.900,00	1.925.826.000,00	3.896.491.900,00	1.925.826.000,00
IPWL	-		-	-
Obat BPJS	-	284.316.105,00	-	284.316.105,00
Diklat	27.000.000,00	-	27.000.000,00	-
Total	**4.581.529.698,00**	**2.378.140.270,00**	**3.976.265.173,00**	**2.983.404.795,00**

Penambahan Piutang Lain-Lain PAD yang sah adalah dari Pasien Umum, Pasien Dinsos, BPJS Kesehatan dan Obat BPJS Kesehatan sejumlah Rp. 2.378.140.270,00.

Pengurangan Piutang Lain-Lain PAD yang sah setelah hasil audit BPK-RI adalah dari Pasien Umum, Pasien Dinsos, Klaim BPJS Ketenagakerjaan, Klaim BPJS Kesehatan dan Diklat sebesar Rp 3.976.265.173,00 (adanya selisih kurang sebesar Rp. 4.000.000,00 dari nilai piutang pasien umum sebelumnya).

Saldo akhir Piutang Lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. ***2.983.404.795,00***. Nilai ini belum termasuk perkiraan klaim Obat BPJS sebesar Rp. 696.909.847,00 yang belum diverifikasi oleh BPJS karena adanya perubahan sistem aplikasi penghitungan. Klaim BPJS Kesehatan untuk Rawat Inap dan Rawat Jalan yang belum diverifikasi oleh BPJS yaitu Klaim Bulan November 2019 sebesar Rp. 1.221.912.900,00, bulan dan Bulan Desember 2019 senilai Rp. 1.571.738.532,00.

Beberapa upaya yang sudah dilakukan untuk penagihan terhadap piutang ini, diantaranya mengirimkan surat tagihan ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota yang bekerjasama dengan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang dan pasien umum yang terdata pada Bagian Keuangan.
Selengkapnya, daftar piutang lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada Lampiran 9.

Perkiraan	2019	2018
5. Beban Dibayar Dimuka	**32.023.822,00**	**0,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Dibayar Dimuka RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang per 31 Desember 2019 dan 2018.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Beban Jasa Dibayar Dimuka	0,00	32.023.822,00	0,00	32.023.822,00
Total	**0,00**	**32.023.822,00**	**0,00**	**32.023.822,00**

Beban Dibayar Dimuka adalah merupakan Beban Jasa Dibayar Dimuka berupa biaya premi asuransi 6 unit kendaraan dinas (mobil) pada RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang per Desember 2019 untuk satu tahun ke depan.
Rincian lebih lanjut tentang beban dibayar dimuka dapat dilihat pada lampiran 11.

Perkiraan	2019	2018
6. Persediaan	**2.485.244.250,00**	**2.772.584.649,33**

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang per 31 Desember 2019 dan 2018.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Bahan Pakai Habis	617.960.110,00	892.907.883,00	1.112.797.313,00	398.070.680,00
Bahan Material	1.898.189.739,33	3.764.650.747,60	3.763.621.166,93	1.899.219.320,00
Barang Lainnya	256.434.800,00	165.882.550,00	234.363.100,00	187.954.250,00
Total	**2.772.584.649,33**	**4.823.441.180,60**	**5.110.781.579,93**	**2.485.244.250,00**

Penambahan adalah sebesar Rp. 4.823.441.180,60
Pengurangan adalah sebesar Rp. 5.110.781.579,93
Rincian lebih lanjut tentang persediaan dapat dilihat pada lampiran 16.

ASET TETAP

Perkiraan	2019	2018
7. Tanah	**20.501.807.000,00**	**20.501.807.000,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai tanah milik pemerintah provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang pada posisi per 31 Desember 2019 dan 2018.

1. Dasar penilaiannya :

a.	Neraca awal 2005	20.501.807.000,00
b.	Harga perolehan 2006-2019	0,00
c.	Apraissal 2011	0,00
d.	Apraissal 2012	0,00
e.	Apraissal 2013	0,00
f.	Apraissal 2014	0,00

Daftar tanah RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2019 dalam bentuk KIB A, dapat dilihat pada buku inventaris RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2019.

2. Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Tanah	20.501.807.000,00	0,00	0,00	20.501.807.000,00

Saldo Audited 2018	**20.501.807.000,00**
Mutasi Tambah	
- Belanja Modal tahun 2018	0,00
Total Mutasi Tambah	0,00
Mutasi Kurang	
-Belanja Modal yang tidak dikapitalisir	0,00
Total Mutasi Kurang	0,00
Total Mutasi	0,00
Saldo Per 31 Des 2019	**20.501.807.000,00**

Rekapitulasi / daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap tanah per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada lampiran 17.

Perkiraan	2019	2018
8. Peralatan dan Mesin	**24.909.880.095,40**	**24.019.904.728,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo peralatan dan mesin milik pemerintah provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang pada posisi per 31 Desember 2019 dan 2018.

1. Dasar penilaiannya:

a.	Neraca awal 2005	1.290.273.800,00
b.	Harga perolehan 2006-2019	23.619.606.295,40
c.	Apraissal 2011	0,00
d.	Apraissal 2012	0,00
e.	Apraissal 2013	0,00
f.	Apraissal 2014	0,00

Daftar peralatan dan mesin RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2019 dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada buku inventaris RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2019.

2. Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Peralatan dan Mesin	24.019.904.728,00	1.057.791.770,40	167.816.403,00	24.909.880.095,40
Akm. Peny. Peralatan dan Mesin	16.866.678.070,03	2.676.397.094,77	143.739.582,09	19.399.335.582,71
Nilai Buku	7.153.226.657,97	(1.618.605.324,37)	24.076.820,91	5.510.544.512,69

Saldo Audited 2018	**24.019.904.728,00**
<u>Mutasi Tambah</u>	
- Belanja Modal tahun 2019	1.057.791.770,00
- Koreksi Saldo Awal	0,40
Total Mutasi Tambah	**1.057.791.770,40**
<u>Mutasi Kurang</u>	
- Belanja Modal yang tdk dikapitalisir	965.000,00
- Koreksi Saldo Awal	1.701.700,00
- Reklas ke aset tidak bermanfaat	165.149.703,00
Total Mutasi Kurang	**167.816.403,00**
Total Mutasi	889.975.367,40
Saldo Per 31 Des 2019	**24.909.880.095,40**

Penjelasan Mutasi Tambah

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 1.057.791.770,40 telah diuraikan dalam penjelasan pos-pos LRA-Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

Penjelasan Mutasi Kurang

a. Belanja modal yang tidak dikapitalisir senilai Rp. 965.000,00 telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA Belanja Modal Peralatan dan Mesin.
b. Koreksi Saldo Awal 1.701.700,00
c. Reklasifikasi senilai Rp. 165.149.703,00 ke aset tidak bermanfaat.

Rekapitulasi/daftar mutasi tambah dan kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada lampiran 17.

Perkiraan	2019	2018
9. Gedung dan Bangunan	**64.309.250.095,00**	**57.608.219.555,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo gedung dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada posisi 31 Desember 2019 dan 2018.

1. Dasar penilaiannya:

a.	Neraca awal 2005	11.796.713.881,00
b.	Harga perolehan 2006-2019	52.512.536.214,00
c.	Apraissal 2011	0,00
d.	Apraissal 2012	0,00
e.	Apraissal 2013	0,00
f.	Apraissal 2014	0,00

Daftar gedung dan bangunan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2019 dalam bentuk KIB C, dapat dilihat pada buku inventaris RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2019.

2. Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Gedung dan Bangunan	57.608.219.555,00	6.874.101.540,00	173.071.000,00	64.309.250.095,00
Akm. Peny. Gedung dan Bangunan	12.167.719.699,83	1.693.048.029,30	602.040,00	13.860.165.689,13
Nilai Buku	45.440.499.855,17	5.181.053.510,70	172.468.960,00	50.449.048.405,87

Saldo Audited 2018	**57.608.219.555,00**
Mutasi Tambah	
- Belanja Modal tahun 2019	6.213.505.250,00
- Belanja Barang & Jasa yg dikapitalisir	56.388.000,00
- Reklas dari :	
a. Jalan, Irigasi dan Jaringan	535.228.790,00
b. KDP	68.979.500,00
Total Mutasi Tambah	**6.874.101.540,00**
Mutasi Kurang	
- Koreksi Saldo Awal	10.034.000,00
Reklas ke:	
-KDP	163.037.000,00
Total Mutasi Kurang	**173.071.000,00**
Total Mutasi	**6.701.030.540,00**
Saldo Per 31 Des 2019	**64.309.250.095,00**

Penjelasan Mutasi Tambah

a. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 6.213.505.250,00 telah diuraikan dalam penjelasan pos-pos LRA-Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

b. Belanja Barang & Jasa yang dikapitalisir sebesar Rp. 56.388.000,00 merupakan belanja pemeliharaan gedung dan bangunan berupa pembuatan ruangan dekontaminasi di IGD.

c. Reklasifikasi senilai Rp 535.228.790,00 dari Jalan, Irigasi dan Jaringan, karena jalan tersebut merupakan jalan komplek.

d. Reklasifikasi senilai Rp 68.979.500,00 dari KDP berupa DED Bangsal Rawat Inap Kelas II yang telah dilaksanakan.

Penjelasan Mutasi Kurang

a. Koreksi Saldo Awal senilai Rp. 10.034.000,00 dari Hasil Audit BKP yaitu koreksi dari Gedung dan Bangunan dibawah Nilai Kapitaslisasi Aset. (Reklas dari KIB C ke Exrakomptabel.

b. Reklasifikasi ke KDP senilai Rp. 163.037.000,00 berupa Pagar Rumah Sakit yang belum selesai pengerjaannya.

Rekapitulasi/daftar mutasi tambah dan kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada lampiran 17.

Perkiraan	2019	2018
10. Aset Tetap Lainnya	**53.142.050,00**	**53.142.050,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Tetap lainnya milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada posisi 31 Desember 2019 dan 2018.

1. Dasar penilaiannya:

a.	Neraca awal 2005	0,00
b.	Harga perolehan 2006-2019	53.142.050,00
c.	Apraissal 2011	0,00
d.	Apraissal 2012	0,00
e.	Apraissal 2013	0,00
f.	Apraissal 2014	0,00

Daftar Aset Tetap Lainnya RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2019 dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada buku inventaris RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

2. Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset tetap lainnya	53.142.050,00	0,00	0,00	53.142.050,00
Akm. Peny. Aset tetap lainnya	5.613.000,00	0,00	5.613.000,00	0,00
Nilai Buku	47.529.050,00	0,00	(5.613.000,00)	53.142.050,00

Saldo Audited 2018	**53.142.050,00**
<u>Mutasi Tambah</u>	
- Belanja Modal tahun 2019	0,00
Total Mutasi Tambah	**0,00**
<u>Mutasi Kurang</u>	
- Aset lainnya	0,00
Total Mutasi Kurang	**0,00**
Total Mutasi	**0,00**
Saldo Per 31 Des 2019	**53.142.050,00**

Penjelasan Mutasi Tambah

a. Belanja Modal aset tetap lainnya sebesar Rp. 0,00 adalah belanja buku pustaka yang tidak terealisasikan dan telah diuraikan dalam penjelasan pos-pos LRA-Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Penjelasan Mutasi Kurang

a. Tidak ada mutasi kurang.

Rekapitulasi / daftar mutasi tambah dan kurang Aktiva Tetap lainnya per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada lampiran 17.

Perkiraan	2019	2018
11. Konstruksi Dalam Pengerjaan	**784.547.996,00**	**690.490.496,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada posisi 31 Desember 2019 dan 2018.

1. Dasar penilaiannya:

a.	Neraca awal 2005	0,00
b.	Harga perolehan 2006-2019	784.547.996,00
c.	Apraissal 2011	0,00
d.	Apraissal 2012	0,00
e.	Apraissal 2013	0,00
f.	Apraissal 2014	0,00

2. Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Konstruksi Dalam Pengerjaan	690.490.496,00	163.037.000,00	68.979.500,00	784.547.996,00
Nilai Buku	690.490.496,00	163.037.000,00	68.979.500,00	784.547.996,00

Saldo Audited 2018	**690.490.496,00**
Mutasi Tambah	
-Reklasifikasi dari:	
Gedung dan Bangunan	163.037.000,00
Total Mutasi Tambah	**163.037.000,00**
Mutasi Kurang	
-Reklas ke:	
Gedung dan Bangunan	68.979.500,00
Total Mutasi Kurang	**68.979.500,00**
Total Mutasi	**94.057.500,00**
Saldo Per 31 Des 2019	**784.547.996,00**

Penjelasan Mutasi Tambah

a. Reklasifikasi senilai Rp 163.037.000,00 dari gedung ke KDP berupa Bangunan Pagar Rumah Sakit Lanjutan Depan karena belum selesai pengerjaannya.

Penjelasan Mutasi Kurang

a. Reklasifikasi senilai Rp 68.979.500,00 ke Gedung dan Bangunan berupa DED Pembangunan Bangsal Kelas II yang pembangunannya telah selesai dilaksanakan.

Rekapitulasi / daftar mutasi tambah dan kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada lampiran 17 dan 20.

Perkiraan	2019	2018
12. Akumulasi Penyusutan	**(33.259.501.271,84)**	**(29.040.010.769,86)**

Terdiri dari:

•	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	19.399.335.582,71	16.866.678.070,03
•	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	13.860.165.689,13	12.167.719.699,83
•	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	5.613.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap posisi 31 Desember 2019 dan 2018. Akumulasi penyusutan ini terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin, Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya. Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan tersebut :

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Akm. Peralatan dan mesin	16.866.678.070,03	2.676.397.094,77	143.739.582,09	19.399.335.582,71
Akm. Gedung dan Bangunan	12.167.719.699,83	1.693.048.029,30	602.040,00	13.860.165.689,13
Akm. Aset tetap lainnya	5.613.000,00	0,00	5.613.000,00	0,00
Jml. Akm.Peny	29.040.010.769.86	4.369.445.124,07	149.954.622,09	33.259.501.271,84

Uraian	Akum. Peny. Peralatan & Mesin	Akum. Peny.Gedung & Bangunan	Akum. Peny Aset Tetap Lainnya
Saldo Akm. Peny. Per 31 Des 2018	**16.866.678.070,03**	**12.167.719.699,83**	**5.613.000,00**
Jumlah Mutasi Tambah	**2.676.397.094,77**	**1.693.048.029,30**	**0,00**
Koreksi tambah nilai	0,00	219.856.610,71	0,00
Beban Penyusutan	2.676.397.094,77	1.473.191.418,59	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	**143.739.582,09**	**602.040,00**	**5.613.000,00**
Reklas ke Aset Tak Bermanfaat	142.718.562,00	0,00	0,00
Koreksi Nilai	1.021.020,09	602.040,00	5.613.000,00
Beban Penyusutan Tahun 2019	0,00	0,00	0,00
Saldo Akhir Akm. Penyusutan Per 31 Des 2019	**19.399.335.582,71**	**13.860.165.689,13**	**0,00**

Penjelasan Mutasi Tambah Akum. Peny Peralatan dan Mesin

a. Nilai koreksi tambah sebesar Rp. 2.676.397.094,77 merupakan nilai beban penyusutan peralatan dan mesin.

Penjelasan Mutasi Kurang Akum. Peny Peralatan dan Mesin

a. Nilai sebesar Rp. 142.718.562,00 merupakan nilai reklas dari peralatan dan mesin ke aset tidak bermanfaat.
b. Nilai Mutasi Tambah sebesar Rp. 1.021.020,09 adalah koreksi saldo awal.

Penjelasan Mutasi Tambah Akum. Peny Gedung dan Bangunan

a. Nilai Koreksi Tambah sebesar Rp. 219.856.610,71 adalah koreksi nilai saldo awal.
b. Nilai koreksi tambah sebesar Rp. 1.473.191.418,59 merupakan nilai beban penyusutan gedung dan bangunan.

Penjelasan Mutasi Kurang Akum. Peny Gedung dan Bangunan

a. Koreksi Saldo Awal sebesar Rp. 602.040,00.

Penjelasan Mutasi Tambah Akum. Peny Aset Tetap Lainnya

a. Tidak ada mutasi tambah.

Penjelasan Mutasi Kurang Akum. Peny Aset Tetap Lainnya

a. Nilai sebesar Rp. 5.613.000,00 merupakan koreksi saldo awal aset tetap lainnya.

Aset Lainnya

Perkiraan	2019	2018
13. Aset Tidak Berwujud	**636.111.000,00**	**636.111.000,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tidak Berwujud sampai dengan posisi 31 Desember 2019 dan 2018.

1. Dasar penilaiannya:

a.	Neraca awal 2005	0,00
b.	Harga perolehan 2006-2019	636.111.000,00
c.	Apraissal 2011	0,00
d.	Apraissal 2012	0,00
e.	Apraissal 2013	0,00
f.	Apraissal 2014	0,00

Dasar penilaian Aset Tidak Berwujud senilai Rp. 636.111.000,00 dinilai berdasarkan harga perolehan tahun 2006-2019

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tidak Berwujud	636.111.000,00	0,00	0,00	636.111.000,00
Akm. Amortisasi	510.511.000,00	123.400.000,00	0,00	633.911.000,00
Nilai Buku	125.600.000,00	(123.400.000,00)	0,00	2.200.000,00

Rekapitulasi Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tidak Berwujud dapat dilihat dari lampiran 18.

Perkiraan	2019	2018
14. Akm. Amortisasi Aset Tidak Berwujud	**(633.911.000,00)**	**(510.511.000,00)**

Jumlah tersebut merupakan saldo Amortisasi Aset Tidak Berwujud posisi per 31 Desember 2019 dan 2018. Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi amortisasi :

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Akm. Amortisasi	510.511.000,00	123.400.000,00	0,00	633.911.000,00

Saldo Akm. Amortisasi Per 31 Des 2018	510.511.000,00
Mutasi Tambah	
Beban penyusutan	123.400.000,00
Total Mutasi Tambah	**123.400.000,00**
Mutasi Kurang	
Total Mutasi Kurang	**0,00**
Saldo Per 31 Des 2019	**633.911.000,00**

Penjelasan Mutasi Tambah

a. Mutasi tambah senilai Rp. 123.400.000,00 adalah beban penyusutan amortisasi.

Perkiraan	2019	2018
15. Aset Tidak Bermanfaat	**52.994.000,00**	**219.589.258,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo aset tidak bermanfaat dengan posisi per 31 Desember 2019 dan 2018. Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang aset tidak bermanfaat:

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset tidak bermanfaat	219.589.258,00	165.149.703,00	331.744.961,00	52.994.000,00

Saldo Audited 2018	**219.589.258,00**
Mutasi Tambah	
- Reklasifikasi dari :	
Peralatan dan mesin	165.149.703,00
Total Mutasi Tambah	**165.149.703,00**
Mutasi Kurang	
- Penghapusan dengan SK Gubernur	331.744.960,60
- Koreksi Nilai Saldo Awal	0,40
Total Mutasi Kurang	**331.744.961,00**
Total Mutasi	**(166.595.258,00)**
Saldo Per 31 Des 2019	**52.994.000,00**

Penjelasan Mutasi Tambah

a. Reklasifikasi dari peralatan dan mesin sebesar Rp. 165.149.703,00 yaitu usulan penghapusan peralatan mobiler dan alkes karena sudah rusak berat.

Penjelasan Mutasi Kurang

a. Penghapusan dengan SK Gubernur sebesar Rp. 331.744.960,60 dengan No. 030-558-2019 tanggal 26 Juli 2019.

Perkiraan	2019	2018
16. Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Bermanfaat	**52.994.000,00**	**219.589.258,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo akumulasi penyusutan aset tidak bermanfaat dengan posisi per 31 Desember 2019 dan 2018. Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan aset tidak bermanfaat :

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Akumulasi Penyusutan	219.589.258,00	142.718.562,08	309.313.820,08	52.994.000,00

Saldo Audited 2018	**219.589.258,00**
<u>Mutasi Tambah</u>	
- Reklasifikasi dari:	
Peralatan dan mesin	142.718.562,00
Koreksi Nilai Saldo Awal	0,08
Total Mutasi Tambah	**142.718.562,08**
<u>Mutasi Kurang</u>	
- Penjualan dengan SK Gubernur	309.313.820,08
Total Mutasi Kurang	**309.313.820,08**
Total Mutasi	**166.595.258,00**
Saldo Per 31 Des 2019	**52.994.000,00**

Rekapitulasi mutasi tambah dan kurang Aset Tidak Bermanfaat dapat dilihat pada lampiran 18.

5.2.2. KEWAJIBAN

Perkiraan	2019	2018
17. Utang Perhitungan Pihak Ketiga	**0,00**	**118.925.439,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 2018.

Perkiraan	2019	2018
18. Utang Belanja	**2.139.640.990,00**	**3.406.057.252,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Belanja yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah kepada pemberi jasa dan PNS per 31 Desember 2019 dan 2018. Utang belanja ini terdiri dari utang belanja listrik, air dan telepon yang merupakan pemakaian bulan Desember 2019 sebesar Rp. 67.686.213,00 yang dibayarkan bulan Januari, Utang Jasa Pelayanan kepada Pegawai Rp. 2.068.443.742,00 dan biaya pengangkutan limbah medis/limbah B3 sebesar Rp. 3.511.035,00. Berbeda dari tahun sebelumnya, Utang Belanja pada tahun ini tidak termasuk belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada PNS atas kinerjanya yang telah dilaporkan untuk bulan November dan Desember 2019, pengakuan ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Utang Listrik, Air dan Telepon	73.808.818,00	67.686.213,00	73.808.818,00	67.686.213,00
Utang Biaya Pengangkutan Limbah B3	0,00	3.511.035,00	0,00	3.511.035,00
Utang Jasa Pelayanan pada Pegawai	2.582.094.127,00	2.068.443.742,00	2.582.094.127,00	2.068.443.742,00

Selengkapnya rincian utang belanja ini dapat dilihat pada lampiran 13.

5.2.3. EKUITAS DANA

Perkiraan	2019	2018
19. Ekuitas	**82.091.940.433,13**	**78.461.056.643.50**

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas RSJ. Prof. HB. Saanin Padang Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2019 dan 2018. Ekuitas ini terdiri dari :

1.	Ekuitas Awal	78.461.056.643.50
2.	Koreksi Ekuitas	(90.562.513,22)
3.	RK PPKD	27.225.609.242,00
4.	Surplus/Defisit LO	(23.504.162.939,15)
5.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	0,00
6.	Ekuitas Akhir	82.091.940.433,13

Secara lengkap perubahan Ekuitas dilaporkan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Surplus/ Defisit LO adalah selisih antara pendapatan LO dengan Beban LO yang dijelaskan pada penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional. Sedangkan RK/PPKD adalah rekening penghubung antara OPD dengan PPKD yang akan dieliminasi saat menyusun Laporan Konsolidasi.

5.3 Penjelasan Laporan Operasional (LO)

5.3.1 Pendapatan LO

No	Perkiraan	Tahun 2019	Tahun 2018
1.	**Pendapatan Lain-Lain PAD yang sah**	**27.090.063.027,00**	**26.648.642.759,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo pendapatan retribusi daerah – LO dalam tahun 2019 dan tahun 2018. Bila dibandingkan dengan tahun 2018, maka terdapat kenaikan sebesar Rp. 441.420.268,00.

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan-LRA dengan Pendapatan-LO dapat dijelaskan sbb:

Objek Pendapatan LRA/LO	Pendapatan-LRA	Pendapatan-LO	Selisih +/-
• Pendapatan lain-lain PAD yang sah	28.684.187.930,00	27.090.063.027,00	1.594.124.903,00
Jumlah	**28.627.487.930,00**	**27.033.363.027,00**	**1.594.124.903,00**

Penjelasan selisih :

a. Berupa selisih piutang tahun lalu yang diakui sebagai perbedaan LRA tahun ini sebesar Rp. 1.594.124.903,00.

5.3.2 Beban

No	Perkiraan	Tahun 2019	Tahun 2018
1.	**Beban Pegawai**		
a.	APBD	19.012.375.395,00	18.844.580.631,00
b.	BLUD	131.332.773,00	4.178.837.962,00
	Jumlah Beban Pegawai	**19.143.708.168,00**	**23.023.418.593,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Pegawai Tahun 2019 dan tahun 2018. Beban Pegawai ini terdiri dari beban gaji dan tunjangan-LO, yaitu :

No	Perkiraan	Tahun 2019	Tahun 2018
1.	**APBD**	**19.012.375395,00**	**18.844.580.631,00**
a.	Beban Gaji dan Tunjangan-LO	**14.483.077.827,00**	**13.604.727.835,00**
-	Gaji Pokok PNS-LO	11.316.555.810,00	10.587.093.500,00
-	Tunjangan Keluarga-LO	1.077.909.511,00	1.007.683.458,00
-	Tunjangan Jabatan-LO	195.600.000,00	227.720.000,00
-	Tunjangan Fungsional-LO	953.365.000,00	927.255.000,00
-	Tunjangan Fungsional Umum-LO	222.885.000,00	170.775.000,00
-	Tunjangan Beras-LO	602.824.080,00	582.763.740,00
-	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	23.169.197,00	65.216.899,00
-	Iuran Jaminan Kematian/Uang Muka	69.508.434,00	21.736.573,00
-	Tunjangan PPh-LO	21.080.190,00	14.333.769,00
-	Pembulatan Gaji-LO	180.605,00	149.896,00
b.	Beban Tambahan Penghasilan PNS-LO	**4.529.297.568,00**	**5.239.852.796,00**
-	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja-LO	4.529.297.568,00	5.239.852.796,00
2.	**BLUD**	**131.332.773,00**	**4.178.837.962,00**
a.	Beban Pegawai BLUD-LO	131.332.773,00	4.178.837.962,00

Adapun perbedaan jumlah Belanja Pegawai-LRA dengan beban pegawai-LO dapat dijelaskan sbb:

Objek Belanja LRA/LO	Belanja Pegawai LRA	Beban Pegawai LO	Selisih +/-
APBD			
• Gaji dan tunjangan	14.483.077.827,00	14.483.077.827,00	
• Tambahan Penghasilan PNS	5.275.498.975,00	4.529.297.568,00	746.201.407,00
Jumlah Beban Pegawai APBD	**19.758.576.802,00**	**19.012.375.395,00**	**746.201.407,00**
BLUD			
• Belanja Pegawai BLUD	135.285.673,00	131.332.773,00	3.952.900,00
Jumlah Beban Pegawai APBD dan BLUD	**19.893.862.475,00**	**19.143.708.168,00**	**750.154.307,00**

Penjelasan selisih :

a. Selisih senilai Rp. 750.154.307,00 berupa selisih beban pegawai BLUD berupa belanja Jasa Pelayanan pada jurnal penyesuaian.

No	Perkiraan	Tahun 2019	Tahun 2018
2.	**Beban Barang dan Jasa**		
a.	APBD	-	-
b.	BLUD	27.914.257.395,81	26.301.106.267,00
	Jumlah Beban Barang dan Jasa	**27.914.257.395,81**	**26.301.106.267,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Barang dan Jasa BLUD tahun 2019 dan 2018. Adapun perbedaan jumlah Belanja Barang dan Jasa- LRA dengan beban barang dan Jasa-LO dapat dijelaskan sbb :

Objek Belanja LRA/LO	Belanja Brg & Jasa LRA	Beban Brg & Jasa LO	Selisih +/-
APBD			
BLUD			
• Belanja/ beban barang dan jasa BLUD	28.235.543.674,00	27.782.924.622,81	452.619.051,19
Jumlah	**28.235.543.674,00**	**27.782.924.622,81**	**452.619.051,19**

Penjelasan selisih :

a. Selisih sebesar Rp. 452.619.051,19 berupa selisih pencatatan persediaan pada jurnal penyesuaian

Beban Persediaan	= Rp.	328.669.290,79
B. Barang & Jasa BLUD (LO)	= Rp.	123.949.760,40
Jumlah	= Rp.	452.619.051,19

Belanja Barang dan Jasa LO terdiri dari :

- Belanja Persediaan BLUD 4.823.441.180,60
- Belanja Jasa BLUD 21.920.113.210,73
- Belanja Pemeliharaan 752.189.516,00
- Belanja Perjalanan Dinas 287.180.716,00

No	Perkiraan	Tahun 2019	Tahun 2018
3.	**Beban Penyusutan dan Amortisasi**	**4.272.988.513,36**	**4.349.480.537,33**

Jumlah tersebut merupakan saldo beban penyusutan Tahun 2019 dan 2018. Beban penyusutan dan amortisasi ini terdiri dari :

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.676.397.094,77
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.473.191.418,59
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	123.400.000,00

Beban penyusutan untuk Aset Tetap dan Aset Lainnya serta Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud untuk masing-masing kelompok aset dihitung berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 serta Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015.

Selengkapnya beban penyusutan per kode barang, dapat dilihat pada KIB B, C, D daftar inventaris RSJ. Prof. HB. Saanin Padang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini. Rekapitulasi Aset Tetap beserta Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutan dapat dilihat pada lampiran 17.

No	Perkiraan	Tahun 2019	Tahun 2018
4.	**Beban Penyisihan Piutang**	**(605.395.338,02)**	**829.934.961,96**

Jumlah tersebut merupakan saldo beban penyisihan piutang RSJ. Prof. HB. Saanin Padang Tahun 2019 dan 2018 dengan rincian sebagai berikut :

a. Penyisihan piutang retribusi / piutang lain-lain PAD yang sah :

Kualitas Piutang	Umur Piutang	Jumlah Piutang	% Penyisihan	Jumlah Beban Penyisihan Piutang
Lancar	≤ 1 bln	24.521.598,00	0,5%	122.607,99
Kurang Lancar	1-3 bln	1.575.636.956,00	10%	157.563.695,60
Diragukan	>3-12 bln	774.715.243,00	50%	387.357.621,50
Macet	> 12 bln	612.530.998,00	100%	612.530.998,00
Jumlah		**2.987.404.795,00**		**1.157.574.923,09**

Adapun beban penyisihan piutang tahun ini adalah sebesar selisih akumulasi piutang tahun ini dengan akumulasi piutang tahun lalu yaitu :

Uraian	Akm. Penyisihan Piutang Per 31 Desember 2019	Akm. Penyisihan Piutang Per 31 Desember 2018	Jumlah Beban Penyisihan Piutang
1	*2*	*3*	*2-3*
Piutang Pasien Umum	452.997.755,76	408.246.666,70	44.751.089,06
Piutang Dinsos	214.929.554,83	101.101.031,80	113.828.523,03
Klaim Pasien BPJS	347.489.560,00	1.253.329.110,00	(905.839.550,00)
Klaim Pasien BPJS TK	-	158.452,61	(158.452,61)
Klaim Obat BPJS	142.158.052,50	-	142.158.052,50
Klaim IPWL	-	-	-
Diklat	-	135.000,00	(135.000,00)
Jumlah	**1.157.574.923,09**	**1.762.970.261,11**	**(605.395.338,02)**

Beban penyisihan piutang untuk masing-masing jenis piutang dihitung berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015.

Rekapitulasi daftar piutang beserta penyisihan piutang dapat dilihat pada lampiran 7,8,9.
Sedangkan daftar jurnal penyesuaian yang dibuat oleh RSJ. Prof. HB. Saanin Padang untuk semester 1 dan semester 2 dapat dilihat pada lampiran 28.

5.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Ekuitas awal sebesar Rp. 78.461.056.643,50 adalah saldo ekuitas berdasarkan Neraca Audited per 31 Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Perkiraan	2019	2018
Ekuitas Awal	78.461.056.643,50	81.462.958.369,31
Koreksi Ekuitas	(90.562.513,22)	(128.256.743,52)
Surplus/Defisit LO	(23.504.162.939,15)	(27.855.297.600,29)
RK PPKD	27.225.609.242,00	24.981.652.618,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	0,00	0,00
Ekuitas Akhir	82.091.940.433,13	78.461.056.643,50

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Ekuitas awal sebesar Rp. 78.461.056.643,50 adalah saldo ekuitas berdasarkan neraca per 31 Desember 2018.

2. Surplus/Defisit LO sebesar Rp. (23.504.162.939,15) adalah selisih antara pendapatan LO dan Beban LO Tahun 2019.
3. RK PPKD sebesar Rp. 27.225.609.242,00 adalah akun penghubung transaksi OPD dan PPKD Tahun 2019 yang akan dieliminasi saat disusun Laporan Konsolidasi.
4. Ekuitas akhir sebesar Rp. 82.091.940.433,13 adalah saldo ekuitas RSJ. Prof. HB. Saanin Padang Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2019.

5.5 Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

Dengan diterapkannya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka terdapat akun-akun baru pada Neraca sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja yaitu :

1. Penyisihan Piutang
2. Beban Dibayar Dimuka
3. Pendapatan Diterima Dimuka
4. Utang Belanja

Sedangkan pada Laporan Operasional :

1. Beban Penyusutan dan Amortisasi
2. Beban Penyisihan Piutang

Rekonsiliasi antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan basis kas dengan Laporan Operasional (LO) dengan basis akrual, dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

Jenis Pendapatan/ Belanja	LRA	LO	Selisih
• Lain-lain PAD Yg Sah	28.684.187.930,00	27.090.063.027,00	1.594.124.903,00
Jumlah Pendapatan	**28.684.187.930,00**	**27.090.063.027,00**	**1.594.124.903,00**
• Belanja Pegawai	19.758.576.802,00	19.012.375.395,00	746.201.407,00
• Belanja Brg & Jasa	28.235.543.674,00	27.914.257.395,81	321.286.278,19
• Belanja Modal	7.806.525.810,00	-	7.806.525.810,00
• Beban penyusutan dan amortisasi	-	4.272.988.513,36	(4.272.988.513,36)
• Beban Penyisihan Piutang	-	(605.395.338,02)	605.395.338,02
Belanja Operasi	**55.800.646.286,00**	**50.594.225.966,15**	**5.206.420.319,85**

Penjelasan selisih antara LRA dan LO sudah dijelaskan pada penjelasan Laporan Operasional (LO) dan rekapitulasinya dapat dilihat pada Lampiran 27.

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

A. UMUM

1. Sejarah Singkat Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang

Pada tahun 1932 di Padang terdapat dua tempat penampungan orang sakit jiwa. Lokasi di belakang Rumah Sakit Jiwa Tentara di Parak Pisang (Sekarang Rumah Sakit Tentara Reksodiwiryo) disebut sebagai Doorganghhuis Voor Krankzinnigen, dan ini merupakan bagian dari Militere Hospital dan lokasi kedua ditempat RSJ sekarang, disebut sebagai Koloni Orang Sakit Jiwa yang melakukan kegiatan pertanian (sawah, ladang dan perkebunan). Setelah diresmikan berdiri pada tahun 1932 disebut Rumah Sakit Jiwa Parak Pisang, dan Ulu Gadut adalah tempat Koloni Orang Sakit Jiwa.

Pada Zaman Revolusi 1945 terjadi pengungsian orang sakit jiwa secara keseluruhan dari Parak Pisang ke KOSD Ulu Gadut karena situasi semakin tidak aman. Pada 21 Januari 1947, waktu agresi Belanda terjadi lagi evakuasi/pengungsian dari Ulu Gadut ke Sawahlunto karena situasi tidak aman lagi, menumpang dan bergabung dengan RSU Sawahlunto (Pimpinan RSU waktu itu DR. H. Hasan Basri Saanin Dt. Tan Pariaman) kemudian bernama Rumah Sakit Perawatan Jiwa (RPSD).

Pada tahun 1954 dilakukan pembangunan kembali serta pemugaran bangsal-bangsal di Ulu Gadut dan pasien dikembalikan secara bertahap, dan KOSD diubah namanya menjadi Rumah Sakit Jiwa Ulu Gadut.

Sejak tahun 1961 statusnya diubah menjadi Rumah Saki Jiwa Pusat Ulu Gadut Padang (Kapasitas 110 tempat tidur). Pada tahun 1978 keluar SK Menteri Kesehatan RI No. 135/Menkes/SK/IV/78 tanggal 28 April 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa, ditetapkan menjadi Rumah Sakit Jiwa kelas “A” dan merupakan Rumah Sakit Pendidikan yang bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Berdasarkan SK Menkes-Kessos RI No 1732/Menkes-Kesos/2000 tanggal 12 Desember 2000, berubah nama menjadi “Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang” sampai sekarang. Pada Tahun 2000 Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang diserahkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah berdasarkan undang-undang otonomi daerah nomor 22 tahun 1999.

Pada Tahun 2003 Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang ditetapkan menjadi Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. HB. Saanin Padang berdasarkan Keppres No. 40 Tahun 2001 tentang pedoman kelembagaan dan pengelolaan RSUD, Kepmendagri No. 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah, SK Gubernur Sumatera Barat No. 25 Tahun 2003 tentang penetapan struktur organisasi dan tata laksana kerja Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang, dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang.

Pimpinan Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang adalah sebagai berikut :

1. Tahun 1937 – 1942 : dr. Sjofjan Rassad
2. Tahun 1942 – 1946 : dr. Moezbar
3. Tahun 1946 – 1950 : dr. Jazir Dt. Mudo
4. Tahun 1950 – 1956 : dr. H. HB Saanin Dt Tan Pariaman
5. Tahun 1956 – 1958 : dr. Med. J. metz
6. Tahun 1958 – 1961 : dr. Jazir Dt. Mudo
7. Tahun 1961 – 1964 : dr. Tjio Wie Tek (dr. Hadi Tjandrawinata)
8. Tahun 1964 – 1970 : dr. Tjoe Kian Ham (P.Hamdani)
9. Tahun 1970 – 1972 : dr. Pamusuk Harahap
10. Tahun 1972 – 1976 : dr. Darmuis
11. Tahun 1976 – 1981 : dr. Pamusuk Harahap
12. Tahun 1981 – 1992 : dr. Darmuis, Sp.KJ
13. Tahun 1992 – 2000 : dr. H. Nazif Manaf, Sp.KJ
14. Tahun 2000 – 2007 : dr. H. Heryezi Tahir, Sp.KJ
15. Tahun 2007 - 2014 : dr. Kurniawan Sedjahtera, Sp.KJ
16. Tahun 2015- 2018 : dr. Lily Gracediani, M.Kes
17. Tahun 2019 – Sekarang : drg. Ernoviana, M.Kes

Sejak tahun 2003 Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin telah terakreditasi lulus penuh tingkat dasar untuk 5 pelayanan yaitu administrasi manajemen, pelayanan medis, pelayanan gawat darurat, pelayanan keperawatan, dan rekam medis. Pada tahun 2008, LULUS AKREDITASI KARS tingkat lanjut dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : YM 01.10/III/87/09 tanggal 12 Januari 2009 untuk 8 jenis pelayanan, yaitu administrasi manajemen, pelayanan medis, pelayanan gawat darurat, pelayanan keperawatan, rekam medis, instalasi farmasi, K3 dan pengendalian infeksi nosokomial.

Pada tahun 2011, akreditasi untuk 12 pelayanan yaitu administrasi manajemen, pelayanan medis, pelayanan gawat darurat, pelayanan keperawatan, rekam medis, instalasi farmasi, laboratorium, K3 dan pengendalian infeksi nosokomial, instalasi radiologi, gizi, rehabilitasi medik.

2. Profil Rumah Sakit Jiwa Prof. HB Saanin Padang

a. Keadaaan Rumah Sakit Jiwa

1. Nama Rumah Sakit : RS. Jiwa Prof. HB Saanin Padang
2. Kelas Rumah Sakit : “A”
3. Status Kepemilikan : Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat
4. Alamat : Jl. Raya Ulu Gadut
5. Kecamatan : Pauh
6. Kabupaten/kota : Padang
7. Provinsi : Sumatera Barat
8. No. Telp/fax : (0751) 72001 / (0751) 71378

9. E-mail : rsjhbsaanin@yahoo.co.id
10. Website : rsjhbsaanin.sumbarprov.go.id
11. Jumlah tempat tidur : 314 TT
12. Jumlah bangsal :
    - Ruangan
        - Wisma Flamboyan : 25 TT
        - Wisma Anggrek : 14 TT
        - Wisma Cendrawasih : 40 TT
        - Wisma Melati : 40 TT
        - Wisma Merpati : 40 TT
        - Wisma Gelatik/UPIP : 30 TT
        - Wisma Nuri : 45 TT
        - Wisma Dahlia : 30 TT
        - Wisma Teratai : 12 TT
        - Wisma Anak dan Remaja : 13 TT
        - Instalasi NAPZA : 20 TT
13. Sarana dan prasarana:
    - Luas tanah : 93.609 m²
    - Luas bangunan : 34.778 m²
    - Areal parkir : 1.742,5 m²
    - Taman : 3.227 m²
    - Fasilitas air : Sumur Artesis dan PDAM
    - Fasilitas listrik : PLN 197 KVA
    - Fasilitas air limbah cair : IPAL

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang melaksanakan upaya kesehatan yang berdaya guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilakukan secara serasi dan terpadu, dengan cara peningkatan, pencegahan, penyelenggaraan, upaya rujukan, serta pengembangan bidang kesehatan.

4. Pelayanan

Dalam perkembangan pelayanan kesehatan tidak hanya menangani gangguan mental/jiwa, tetapi juga melayani kasus umum sederhana, kasus narkoba, pemeriksaan psikologi, gigi, laboratorium, radiologi, dll.

Jenis pelayanan :

a. Pelayanan Rawat Jalan (Poliklinik) :

- Pelayanan kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia
- Pelayanan kesehatan jiwa anak dan remaja:
    - Poli One Stop Service (OSS) Psikiatri Anak

- Poli Jiwa Anak
- Pelayanan Neurologi
- Pelayanan Penyakit Anak
- Pelayanan Penyakit Dalam
- Pelayanan Napza (IPWL)
- Pelayanan Psikologi (Anak dan Remaja):
  - MMPI
  - Konseling
  - Tes IQ, Minat Bakat, Dll
- Pelayanan Rehabilitasi Medis:
  - Pelayanan Fisioterapi
  - Pelayanan Terapi Okupasi
  - Pelayanan Terapi Wicara
- Pelayanan Kesehatan Gigi
- Pelayanan VCT (HIV-AIDS)

b. Pelayanan Rawat Inap

b.1 Rawat Inap Jiwa Dewasa dan Lanjut Usia

- Wisma Anggrek : Kelas utama dan VIP
- Wisma flamboyan : Kelas I dan II
- Wisma cendrawasih : Kelas II
- Wisma gelatik/UPIP : Kelas II
- Puri melati : Kelas III
- Wisma merpati : Kelas III
- Wisma Nuri : Kelas III
- Puri Dahlia : Kelas III
- Wisma Teratai : Non Kelas

b.2 Rawat Inap Jiwa Anak dan Dewasa

- Bangsal Anak dan Remaja : Kelas I, II,III

b.3 Rawat Inap Napza

- Paviliun Rambun Pamenan : Kelas I
- Paviliun Lindung Bulan : Kelas I

c. Pelayanan Gawat Darurat

c.1 Pelayanan Kegawatdaruratan Jiwa

c.2 Pelayanan Kegawatdaruratan Umum

d. Pelayanan Rehabilitasi Mental

- Terapi Kerja
- Terapi Kelompok

- Terapi Rohani
- Terapi Olahraga

e. Pelayanan Penunjang

- Pelayanan Laboratorium
- Pelayanan Radiologi
- Pelayanan Farmasi
- Pelayanan Gizi Klinis
- Pelayanan Ambulance
- Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat (preventif dan promotif)

f. Pelayanan Unggulan

f.1 Pelayanan Anak

- Tes IQ, Bakat, Minat, Kepribadian dll
- Pelayanan One Stop Service (OSS)
- Gangguan Belajar
- Pelayanan Autisme
- Retardasi Mental
- Konseling Rumah Tangga, Pekerjaan, Sekolah, dll
- Rawat Inap Anak Dan Remaja

f.2 Pelayanan Napza

- Rehabilitasi Rawat Inap
  - Ruang Detoksifikasi
  - Ruang Rawat Inap (Pav. Rambun Pamenan & Pav. Lindung Bulan
  - Buka 24 Jam
  - Akses gedung terpisah dengan pelayanan pasien jiwa
  - Dilayani oleh petugas yang terlatih.
- Rehabilitasi Rawat Jalan
  - Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) bekerjasama dengan BNN, BNP, BNK dan LSM.

5. Sumber Daya Manusia

Untuk pelaksanaan kegiatan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang didukung oleh 369 orang Sumber Daya Manusia yang terdiri dari :

a. Struktural berjumlah 19 orang, terdiri dari :
   - Eselon III.a : 3 orang
   - Eselon III.b : 4 orang
   - Eselon IV.a : 12 orang

b. Fungsional berjumlah 163 orang, terdiri dari :
   - Tenaga medis : 18 Orang

- Apoteker/Ass.Apoteker : 15 Orang
- Psikolog Klinik : 3 Orang
- Para medis perawatan : 102 Orang
- Pekerja sosial : 3 Orang
- Gizi/Nutrisionis : 5 Orang
- Laboratorium : 7 Orang
- Rekam Medis : 5 Orang
- Fisioterapi : 1 Orang
- Elektromedik : 2 Orang
- Pranata Komputer : 1 Orang
- Radiografer : -
- Admin Kes : -
- Sanitasi : 1 Orang

c. Non Fungsional berjumlah 59 orang, terdiri dari :

- Bidang Pelayanan : 15 orang
- Bidang Penunjang : 13 orang
- Bidang Perawatan : 4 orang
- Bidang Diklat : 1 orang
- Bagian Tata Usaha : 11 orang
- Bagian Keuangan : 15 orang
- Pendidikan Tugas Belajar : 4 orang

d. Pegawai non PNS berjumlah 119 orang.

Total Tenaga Per 31 Desember 2019 RSJ.HB. Saanin Padang adalah 363 orang.

Pada tanggal 12 Desember Tahun 2011 RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang telah ditetapkan sebagai PPK-BLU dengan status Badan Layanan Umum-Penuh berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 440-538-2011 tentang penetapan Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Prestasi yang telah diraih RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang khususnya Akreditasi oleh KARS Kementrian Kesehatan RI sebagai berikut :

1. Tahun 2003, lulus Akreditasi Dasar 5 jenis pelayanan
2. Tahun 2008, lulus Akreditasi Tingkat Lanjut 8 jenis pelayanan
3. Tahun 2011, lulus Akreditasi Penuh dengan 12 jenis pelayanan
4. Tahun 2012, lulus akreditasi tingkat lengkap dengan 16 jenis pelayanan
5. Tahun 2012 sampai dengan sekarang, sertifikat ISO Quality Management System 9001: 2008
6. Tahun 2012, Nominasi Citra Pelayanan Prima
7. Tahun 2012, mendapatkan Sertifikat ISO 9001 : 2008 dari TUV Rheinland
8. Tahun 2014, penilaian kinerja oleh BPKB dengan nilai A

9. Tahun 2014, penilaian kinerja LAKIP dengan nilai B
10. Tahun 2011- 2015, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan kategori baik
11. Tahun 2015, penetapan rumah sakit khusus jiwa kelas A sesuai dengan SK Menkes RI nomor: HK 02.03 /I/ 1247/2015
12. Tahun 2015, penilaian kinerja LAKIP dengan nilai B
13. Tahun 2015, penetapan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin sebagai unit kerja yang berintegritas menuju WBK dan WBBM sesuai SK Gubernur Sumbar Nomor: 700-250-2015
14. Tahun 2016, lulus akreditasi paripurna dari KARS dengan 13 BAB versi 2012
15. Tahun 2016, penilaian kinerja LAKIP dengan nilai B
16. Tahun 2017, mempertahankan predikat RS Terakreditasi Lulus Paripurna.
17. Tahun 2018, Pegawai Berprestasi Juara 1 Gol II
18. Tahun 2018, Peringkat 1 Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2018.

BAB VII
PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2019. Laporan keuangan tersebut berpedoman pada kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan untuk penerapannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Selanjutnya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK-05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah maka disusunlah Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Padang, Januari 2020
DIREKTUR

drg. ERNOVIANA, M.Kes
NIP. 19601118 198701 2 001